

ANALISIS PENGARUH JUMLAH ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, PROPORSI PDRB SEKTOR INDUSTRI, PROPORSI PDRB SEKTOR JASA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Sari Fatimah^{*1}, Yuni Prihadi Utomo²

Prodi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

^{*}Corresponding Author:

Email: b300190117@student.ums.ac.id

Abstract.

This study aims to analyze the direction and magnitude of the influence of the number of labor force, minimum wage, domestic investment, proportion of industrial sector GRDP, and proportion of service sector GRDP on the open unemployment rate in regencies or cities in Central Java in 2015-2021 using panel data regression analysis. The results of the analysis show that the Fixed Effect Model (FEM) was chosen as the best estimation model, which shows that the minimum wage has a positive effect on the open unemployment rate and the proportion of GDP in the service sector has a negative effect on the open unemployment rate. Meanwhile, the number of labor force, domestic investment, and the proportion of GRDP in the industrial sector have no effect on the open unemployment rate. The service sector in Central Java is proven to be able to reduce the unemployment rate. In addition, the high or low level of wages will affect the tendency of producers to recruit labor. The government needs to review the prevailing wage policy so as not to burden entrepreneurs in the production process. In addition, public infrastructure development also needs to be improved so that the service sector can operate more efficiently and have more impact on the community's economy.

Keywords: Unemployment, Minimum Wage, Labor Force, Industry, Services

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang sangat rumit dan lebih serius dari permasalahan dalam distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dari pada jumlah penduduk. Oleh karena itu, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin lama bertambah serius. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menambah tingkat kemiskinan (Siswosoemarto, 2012).

Ada berbagai faktor makroekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran, di antaranya adalah inflasi, upah minimum, investasi dan produk domestik bruto (PDRB). Philips menyatakan tingkat pengangguran yang rendah cenderung memiliki inflasi tinggi, sedangkan pengangguran yang tinggi cenderung memiliki inflasi rendah (Mankiw, 2012). Semakin tinggi tingkat inflasi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran (Senet, 2013).

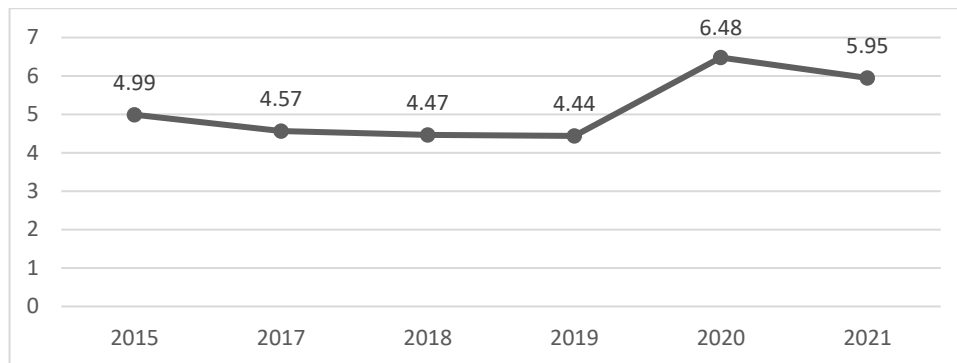
Mankiw (2012) berpendapat jika alasan lain terdapat pengangguran adalah kekakuan upah atau gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Tingkat pertumbuhan ekonomi PDB meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Kreishan, 2011).

Menurut Sukirno (2016) pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang siap untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan, yang sedang mendirikan sebuah usaha, atau orang yang belum mulai bekerja. Jika dilihat dari tingkat pengangguran di Indonesia, Jawa Tengah

berada urutan kedua setelah Jawa Barat yang memiliki jumlah pengangguran terbuka cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Karena tingkat pengangguran di Jawa Tengah disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Grafik 1 memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 hingga 2019 secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Kemudian, tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mulai menurun.

Grafik 1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2015-2021 (persen)



Sumber: Data BPS Jawa Tengah

Hukum Okun (Okun's Law), mengungkapkan bahwa secara empiris korelasi yang ada antara pengangguran dengan tumbuhnya perekonomian. Hukum Okun mengutarakan terdapat korelasi negatif, antara pengangguran dengan tumbuhnya perekonomian. 1% naiknya tingkatan pengangguran dapat menurunkan tumbuhnya perekonomian sebanyak 2% atau lebih (Kuncoro, 2015). Sementara itu, Kurva Philips dalam Mishkin (2012) memperlihatkan jika inflasi meningkat, justru dapat menurunkan angka pengangguran karena perusahaan atau produsen akan menambah jumlah tenaga kerja mereka untuk meningkatkan produksi guna memperoleh keuntungan yang maksimal dari naiknya harga-harga.

Lewis dalam Todaro & Smith (2020), mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor industri, sehingga semakin tinggi nilai investasi di suatu wilayah, maka dapat meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan pengangguran. Teori Lewis membedakan perekonomian ke dalam dua sektor yaitu sektor tradisional dan sektor industri. Pada sektor tradisional dalam keadaan subsisten yang kelebihan penduduk akan mengalami surplus tenaga kerja, sehingga pengangguran cenderung lebih tinggi. Sementara sektor industri di perkotaan, tingkat produktifitas input yang dipakai tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja di sektor industri, sehingga kesempatan kerja naik dan pengangguran dapat ditekan.

Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang tidak bisa dihindarkan, tingginya pengangguran identik dengan rendahnya modal manusianya, sehingga angkatan kerja tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja. Mishkin (2012) berpendapat bahwa ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru menyebabkan tingginya pengangguran yang akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada. Hal tersebut dapat menurunkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Malthus dalam Mishkin (2012) menyatakan bahwa tingginya jumlah penduduk merupakan sebuah keuntungan karena meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga permintaan akan barang dan jasa juga naik. Hal tersebut tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih dan menurunkan pengangguran. Akan tetapi, perbaikan dalam pembangunan modal manusia (kesehatan dan pendidikan) juga perlu diperhatikan guna menciptakan angkatan kerja yang memiliki tingkat produktivitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga tidak menyebabkan pengangguran naik (Lindiarta, 2014).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengamati arah dan besarnya pengaruh jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi PDRB sektor industri, proporsi PDRB sektor jasa terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah.

Tinjauan Pustaka

Maravian et al. (2015), selama periode 1986-2013 dengan menggunakan analisis regresi *ordinary least square* (OLS), menemukan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar -5,46 dengan signifikan empirik t sebesar 0,000(<0,05). Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar 0,0222 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0000(<0,05). Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka dengan signifikan empirik t sebesar 0,1667(>0,10).

Prasaja (2013), selama periode 1980-2011 dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan investasi asing berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik dengan koefisien regresi sebesar -0,3217 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0070(<0,05). Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik dengan koefisien regresi sebesar 7,2417 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0000(<0,01). Inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran terdidik dengan signifikan empirik t sebesar 0,6898(>0,10).

Leasiwal (2021), selama periode 2007-2009 dengan menggunakan analisis regresi *ordinary least square* (OLS), menemukan upah berpengaruh positif terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar 0,0626 dengan empirik t sebesar 0,0006(<0,05). Inflasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar 0,0165 dengan signifikan empirik t sebesar 0,8874(>0,01). PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -0,2773 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0008(<0,01).

Prayuda & Dewi (2015), selama periode 1993-2013 dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan inflasi dan investasi berpengaruh positif terhadap pengangguran masing-masing koefisien regresi sebesar 0,020 dan -0,090 dengan signifikan empirik t sebesar 0,027 (< 0,05) dan 0,033 (< 0,05).

Guretna (2018), selama periode 1987-2017 dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* (OLS), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan investasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran masing-masing koefisien regresi sebesar -0,5295; -0,2293; dan -2,7832 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,0093 (< 0,01); 0,0035 (< 0,01); dan 0,0000 (< 0,01).

Geli et al. (2021), selama periode 2010-2019 di kabupaten Flores Timur dengan menggunakan analisis regresi *ordinary least square* (OLS), menemukan PDRB berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar 3,005 dengan signifikan empirik t sebesar 0,023(<0,05). UMK berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar -4,366 dengan signifikan empirik t sebesar 0,564(<0,046). Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka dengan signifikan empirik t sebesar -0,564(>0,5).

Selama periode 2011-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel di provinsi Sumatera Barat dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), Arizal & Marwan (2019) menemukan PDRB berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar -0,0004, dengan signifikan empirik t sebesar 0,0002(<0,05). IPM berpengaruh positif terhadap pengangguran terbuka dengan koefisien regresi sebesar 0,6886 dengan empirik 0,0167(<0,01).

Sulistiyowati (2019), selama periode 2013-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel di kabupaten/kota provinsi Kalimantan Barat, dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan bahwa variabel upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -0,5609 dengan signifikansi empirik t sebesar 0,0065 (< 0,05).

Selama periode 2011-2015 dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), Mahroji & Nurkhasanah (2019), menemukan indeks pembangunan manusia (IPM), investasi dan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh negatif terhadap pengangguran masing-masing koefisien regresi sebesar -2,3451; (-0,0605); dan -0,4242 dengan signifikan empirik t 0,025 (< 0,05); 0,000 (< 0,05); dan 0,0205 (< 0,05).

Selama periode 2013-2017 dengan menggunakan analisis regresi data panel pada 34 provinsi di Indonesia dengan model terbaik *Random Effect Model* (REM), Anggraini (2021), menemukan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,0002 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0077(<0,01). PDRB dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka masing-masing koefisien regresi sebesar 4,74 dan 0,002 dengan signifikan empirik t sebesar 0,037(<0,05) dan 0,006(<0,05).

Lindiarta (2014), selama periode 1996-2013 dengan menggunakan analisis regresi *ordinary least square* (OLS), menemukan umk dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pengangguran masing-masing koefisien regresi sebesar -0,007 dan -0,083 dengan signifikan empirik t sebesar

0,296(>0,05) dan 0,025(<0,05). Inflasi berpengaruh positif terhadap pengangguran dengan koefisien regresi sebesar 185,721 dengan signifikan empirik t sebesar 0,039(<0,05).

Panjawa & Soebagiyo (2014), selama periode 1999-2013 dengan menggunakan analisis regresi data panel di karesidenan Surakarta, dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -8,17, serta empirik t sebesar 0,000(<0,01). Upah minimum dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pengangguran masing-masing koefisien regresi sebesar 1,16 dan 1,76 dengan empirik t 0,000(<0,05) dan 0,006(<0,05). Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan signifikan empirik t sebesar 0,766(>0,10).

Setiawan (2017), selama periode 2017-2011 dengan menggunakan analisis regresi data panel pada 29 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur, dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan tingkat pengangguran dipengaruhi secara negatif oleh PDRB dan UMK masing-masing koefisien regresi sebesar -1.53E-07, -9.10E-06 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0265(<0,05) dan 0,0000(<0,01), inflasi (INF) ditemukan berpengaruh positif dengan koefisien regresi sebesar 0,103149 dengan signifikan empirik t sebesar 0,1347(>0,10). Sedangkan investasi (INV) ditemukan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan signifikan empirik t sebesar 0,1849(>0,10).

Garnella et al. (2020), selama periode 2011-2018 dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan model terbaik *fixed effect model* (FEM), menemukan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka masing-masing koefisien regresi sebesar -11,856 dan -0,744 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0003(<0,05) dan 0,0418(<0,05). Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka dengan signifikan empirik t sebesar 0,0766(>0,10).

Santoso & Kristiyanto (2021), selama periode 2010-2014 dengan menggunakan regresi data panel di Provinsi Jawa Timur dengan model terbaik *Fixed Effect Model* (FEM), menemukan Inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran dengan koefisien regresi 1544,95 dengan signifikan empirik t sebesar 0,0001(<0,01). Upah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran dengan koefisien regresi sebesar -3,483, dengan signifikan empirik t sebesar 0,0012(<0,05).

II. METHOD

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log JAK_{it} + \beta_2 \log UMK_{it} + \beta_3 \log PMDN_{it} + \beta_4 PIND_{it} + \beta_5 PJSA_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana :

TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
JAK	: Jumlah Angkatan kerja (Jiwa)
UMK	: Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
$PMDN$	: Penanaman modal dalam negeri (Juta Rupiah)
$PIND$	: Proporsi PDRB sektor industri (Persen)
$PJSA$	: Proporsi PDRB sektor jasa (Persen)
$\log$	: Operator Logaritma
β_0	: Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	: Koefisien regresi variabel independen
ε	: <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
i	: Kabupaten/kota ke i di provinsi Jawa Tengah
t	: Tahun ke t

Model ekonometrik di atas merupakan kombinasi dari model ekonometrik Leasiwal (2021), Lukis Panjawa & Soebagiyo (2014), Prayuda & Dewi (2015), dan Prasetya (2017). Penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) diduga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT). Jumlah angkatan kerja (JAK) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka.

Data yang dipakai bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data penelitian adalah data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dan data *cross section*. Data *cross section* meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, data *time series* meliputi tentang pengamatan 2017–2021. Data yang digunakan meliputi data data jumlah angkatan kerja, penanaman modal dalam negeri, proporsi pdrb sektor industri, proporsi pdrb sektor jasa terhadap tingkat pengangguran. Data akan diperoleh Badan Pusat Statistik.

Tahap estimasi analisis regresi data panel akan meliputi: estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (FEM)*; pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman dan jika diperlukan uji Lagrange Multiplier; uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih; uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Estimasi

Hasil estimasi model ekonometrik di muka dengan pendekatan *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* beserta hasil uji pemilihan modelnya terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Estimasi Model Ekonometrik Regresi Data Panel - Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	-64,395	-75,720	-64,718
LOG(JAK)	-0,476	0,321	-0,623
LOG(UMK)	5,282	5,788	5,396
LOG(PMDN)	-0,002	0,042	0,068
PIND	-0,003	0,012	0,004
PJSA	-0,005	-0,195	-0,0171
R^2	0,152	0,793	0,268
Adjusted, R^2	0,127	0,734	0,246
Statistik <i>F</i>	6,071	13,289	12,347
Prob, Statistik <i>F</i>	0,000	0,000	0,000
Uji Pemilihan Model			
(1) Chow			
Cross- Section $F(34,135) = 12,318$; Prob, $F(34,135) = 0,000$			
(2) Hausman			
Cross-Section random $\chi^2(5) = 12,327$; Prob, $\chi^2 = 0,031$			

Sumber: BPS, diolah.

Hasil uji pemilihan model dengan menggunakan Uji Chow dan uji Hausman memperlihatkan bahwa (*FEM*) terpilih sebagai model terestimasi terbaik, terlihat dari probabilitas atau signifikansi empirik statistik *F* dan statistik χ^2 yang masing-masing sebesar 0,000 ($< 0,01$) dan 0,031 ($< 0,05$). Hasil estimasi lengkap dari model terestimasi *FEM*, terlihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3
Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

$TPT_{it} = -75,720 + 0,321 \log JAK_{it} + 5,788 \log UMK_{it} + 0,042 \log PMDN_{it}$			
	(0,881)	(0,000)*	(0,542)
+ 0,012 $PIND_{it}$ -0,195 $PJSA_{it}$			
	(0,434)	(0,001)*	
$R^2 = 0,793$; DW = 2,037; $F = 13,289$; Prob. $F = 0,000$			

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$; Angka di dalam kurung adalah probabilitas nilai statistik t.

Tabel 4
Efek dan Konstanta Wilayah

No.	Kabupaten/Kota	Efek Wilayah	Konstanta
1	Cilacap	-2,708	-78,428
2	Banyumas	-1,790	-77,510
3	Purbalingga	-3,325	-79,045
4	Banjarnegara	1,157	-74,563
5	Kebumen	-0,117	-75,837
6	Purworejo	-2,008	-77,728
7	Wonosobo	-2,638	-78,358
8	Magelang	-4,172	-79,892
9	Boyolali	-1,373	-77,093
10	Klaten	-1,748	-77,468
11	Sukoharjo	-1,221	-76,941
12	Wonogiri	-0,888	-76,608
13	Karanganyar	-0,932	-76,652
14	Sragen	0,974	-74,746
15	Grobogan	-3,594	-79,314
16	Blora	-0,593	-76,313
17	Rembang	-2,317	-78,037
18	Pati	-3,684	-79,404
19	Kudus	-7,809	-83,529
20	Jepara	2,168	-73,552
21	Demak	-3,050	-78,770
22	Semarang	-0,404	-76,124
23	Temanggung	-1,857	-77,577
24	Kendal	-1,493	-77,213
25	Batang	0,126	-75,594
26	Pekalongan	-1,947	-77,667
27	Pemalang	1,417	-74,303
28	Tegal	4,549	-71,171
29	Brebes	1,876	-73,844
30	Kota Magelang	2,187	-73,533
31	Kota Surakarta	8,154	-67,566
32	Kota Salatiga	1,693	-74,027
33	Kota Semarang	4,704	-71,016
34	Kota Pekalongan	1,253	-74,467
35	Kota Tegal	4,170	-71,550

Sumber: BPS, Diolah

Tabel 3 memperlihatkan bahwa model terestimasi *FEM* eksis dengan probabilitas statistik *F* bernilai 0,000 ($< 0,01$), dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,793; yang menunjukkan model terestimasi *FEM* memiliki daya ramal sebesar 79,3%. Dengan demikian, 79,3% variasi tingkat pengangguran terbuka mampu dijelaskan oleh variabel jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi PDRB sektor industri, dan proporsi PDRB sektor jasa, sisanya sebesar 20,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Secara parsial, UMK dan proporsi PDRB sektor jasa berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka masing-masing dengan probabilitas empirik *t* sebesar 0,000 ($< 0,01$) dan 0,001 ($< 0,01$). Jumlah angkatan kerja, penanaman modal dalam negeri, dan proporsi PDRB sektor industri tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, karena masing-masing memiliki probabilitas empirik sebesar 0,881 ($> 0,10$); 0,542 ($> 0,10$) dan 0,434 ($> 0,10$).

Variabel UMK memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5,788, dengan pola hubungan linier-logaritma. Artinya, apabila UMK mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami kenaikan sebesar 0,058%. Sebaliknya, jika UMK turun sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka juga akan menurun sebesar 0,058%.

Variabel proporsi PDRB sektor jasa memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,195, dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila proporsi PDRB sektor jasa mengalami kenaikan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan mengalami penurunan sebesar 0,195%. Sebaliknya, jika proporsi PDRB sektor jasa mengalami penurunan sebesar 1%, maka tingkat pengangguran terbuka akan naik sebesar 0,195%.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa daerah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kota Surakarta, yakni sebesar -67,566. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi PDRB sektor industri, dan proporsi PDRB sektor jasa di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Setelah Kota Surakarta, dua wilayah dengan konstanta terbesar adalah Kota Semarang dan Kabupaten Tegal.

Nilai konstanta terendah dimiliki oleh Kabupaten Kudus, yaitu sebesar -83,529. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi PDRB sektor industri, dan proporsi PDRB sektor jasa di Provinsi Jawa Tengah cenderung memiliki tingkat pengangguran terbuka cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Setelah Kudus, dua Kabupaten dengan konstanta terendah adalah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Pati.

Jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021. Perekonomian di sebagian besar Jawa Tengah masih memakai sistem perekonomian tradisional, banyak pekerja informal seperti petani, nelayan, maupun buruh lepas yang tidak terdaftar jenis pekerjaannya secara terperinci atau tidak memiliki kontrak kerja yang jelas. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya jumlah angkatan kerja tidak akan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka walaupun perekonomian di masyarakat tetap berjalan.

Upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021, sehingga jika upah minimum naik, maka tingkat pengangguran terbuka juga akan naik. Hal ini perlu diwaspadai pemerintah karena pada dasarnya pengusaha akan mengoptimalkan biaya produksi mereka salah satunya dengan memperhitungkan tingkat upah yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah dikenal dengan daerah-daerah dengan tingkat upah yang tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi lainnya, sehingga jika terjadi kenaikan upah yang signifikan, maka produsen dan pengusaha akan berusaha melakukan efisiensi dengan menekan jumlah tenaga kerja mereka dan tingkat pengangguran akan meningkat.

Penanaman modal dalam negeri ditemukan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021. Rendahnya realisasi investasi di Jawa Tengah menjadi hal utama yang menyebabkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sesuai dengan target pemerintah dan pada akhirnya permintaan tenaga kerja serta tingkat pengangguran terbuka tidak terpengaruh karena minimnya nilai investasi dalam negeri tersebut.

Proporsi PDRB sektor industri tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021. Perekonomian di Jawa Tengah yang masih terpusat pada daerah-daerah tertentu menyebabkan sektor industri pada daerah pesisir atau penyangga tidak terlalu berkontribusi dalam pendapatan daerah dan kesempatan kerja yang dimiliki oleh penduduknya. Hal tersebut juga berlaku pada pembangunan ekonomi yang masih terpusat pada daerah tertentu, sehingga sektor industri di daerah lainnya sulit berkembang dan tidak mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka.

Proporsi PDRB sektor jasa berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021. Dengan demikian, jika sektor jasa meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka akan menurun. Sektor jasa merupakan penyokong utama masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari dan berbagai jasa yang mendukung perekonomian mereka. Terlebih lagi pembangunan yang belum merata membuat masyarakat untuk lebih menggunakan jasa umum yang

tersedia agar lebih efisien. Hal ini tentunya akan membuka kesempatan kerja baru bagi penduduk untuk bekerja di sektor jasa dan tingkat pengangguran terbuka menurun.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis regresi data panel, *Fixed Effect Model* (FEM) terpilih menjadi model terestimasi terbaik. Model terestimasi eksis, dengan R^2 sebesar 79,3%; artinya, secara keseluruhan variabel independen, jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi PDRB sektor industri, dan proporsi PDRB sektor jasa bisa menjelaskan 79,3% variasi tingkat pengangguran terbuka. Hasil regresi menunjukkan upah minimum berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan proporsi PDRB sektor jasa berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Sementara jumlah angkatan kerja, penanaman modal dalam negeri, dan proporsi PDRB sektor industri tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2021 ternyata dipengaruhi oleh UMK dan proporsi PDRB sektor jasa, sementara jumlah angkatan kerja, penanaman modal dalam negeri, dan proporsi PDRB sektor industri tidak memiliki pengaruh. Dengan demikian, penentuan upah minimum seharusnya dapat dikaji lebih dalam agar perekonomian khususnya pengusaha tidak terbebani dengan upah yang berlaku. Selain itu, peningkatan infrastruktur publik juga perlu ditingkatkan agar sektor jasa dapat beroperasi dengan lebih efisien dan memiliki dampak lebih terhadap ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan para pengusaha diharapkan dapat menjalin komunikasi lebih baik dalam penetapan upah minimum. Harapannya upah minimum yang berlaku akan sejalan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, sehingga para pengusaha akan meningkatkan produksinya dan menciptakan lapangan kerja baru.

REFERENSI

- Anggraini, Z. A. (2021). Analisis Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(4), 712–722.
- Arizal, M., & Marwan, M. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433.
- Garnella, R., A. Wahid, N., & Yulindawati, Y. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 21–35.
- Geli, K. A. K., Harsono, H., & Widiawati, D. (2021). Pengaruh PDRB, Pertumbuhan Penduduk, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Flores Timur Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 92–107.
- Giri, M., Henny, P. M., & Dewi², U. (2015). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali Tahun 1994-2013. *E-Jurnal EP Unud*, 5(1), 69–95.
- Guretna, E. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Indonesia*, 66, 37–39.
- Hadi Prasaja, M. (2013). Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 72–84.
- Leasiwal, T. C. (2021). A Longitudinal Analysis of the Effect of Wages, Inflation, Economic Growth on Unemployment Rate in Maluku Province. *Indonesia. International Journal of Entrepreneurship*, 25(6), 2021.
- Lindiarta, A. (2014). Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1–15.
- Lukis Panjawa, J., & Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 48–54.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Maravian, B., Qosjim, A., & Khomariyah, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1986 – 2013. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2013, 1–7.
- Prasetya, A. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Jawa

- Tengah Tahun 2011-2015. *Journal Eprints UMS*, 1–12 .
- Santoso, I. H., & Kristiyanto, S. (2021). the Effect of Inflation and Wages on Unemployment in East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(2), 65–81.
- Setiawan, J., Saleh, M., & Yuliati, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2015. *Journal Ekuilibrium*, II(1), 31–37.